

Pembingkaihan Metafora dan Isu Terorisme: Satu Interpretasi Konseptual

DAFRIZAL¹ & FARIDAH IBRAHIM

Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, UKM, Bangi, Selangor, Malaysia
Tel: +603 8921 5354 | Fax: +603 8925 2836 | E-mail: dzal76@gmail.com; fbi@ukm.my

Abstrak Sejak peristiwa 11 September 2001, perdebatan mengenai terorisme sebagai isu global masih dalam perdebatan antara para elit politik, akademisi, masyarakat umum, LSM, dan pemerintah. Beberapa ahli melihat bahwa definisi "terorisme" masih samar dan hanya dapat dipahami dari perspektif dan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji penafsiran konseptual pembingkaihan metafora dan realitas terorisme dalam penggambaran makna di balik perdebatan tentang isu-isu terorisme. Ada beberapa metafora yang sering dibingkai dan dikaitkan dengan isu terorisme seperti "axis of evil", "religious fanatic", dan "war on terror". Hal itu karena pelabelan negatif dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca serangan 9 / 11 di New York dan Washington DC yang diarahkan pada kelompok tertentu yang dianggap mengancam perdamaian dunia. Meskipun ekspresi metafora "freedom fighter" memunculkan konflik dengan istilah "teroris", namun keduanya tidak dapat dipisahkan dari setiap diskusi tentang isu-isu terorisme.

Kata kunci: Pembingkaihan, metafora, terorisme.

Abstract Since the events of September 11, 2001, the debate on terrorism as a global issue has been remaining in dispute among the political elites, scholars, civil society, NGOs, and governments. Some scholars view that the definition of "terrorism" is still vague and can only be understood from the perspective and interests of individuals or certain groups. This study aims at examining the conceptual interpretation of framing metaphor and the reality of terrorism in the depiction of the meaning behind the debate over terrorism issues. There are several metaphorical expressions which are often framed and linked to the terrorism issue such as "axis of evil", "religious fanatic", and "war on terror". The matter is due to the negative labeling of the United States' foreign policy after 9 / 11 attacks in New York and Washington DC directed toward the certain group which is considered threatening to the world peace. Although the metaphorical expressions of "freedom fighter" arise in conflict with the term "terrorist", nevertheless, they could not be separated from every discussion on terrorism issues.

Keywords: Framing, metaphor, terrorism.

CoverAge:
Journal of Strategic
Communication
Vol. 1, No. 1, Hal. 33-45.
September 2010
Fakultas Ilmu Komunikasi,
Universitas Pancasila

Diterima 24 April 2010
Disetujui 10 September 2010

¹ Penulis korespondensi E-mail: dzal76@gmail.com

PENDAHULUAN

Isu terorisme masih tetap menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dunia, baik yang berasal dari masyarakat awam, intelektual, politisi, sarjana, NGO, maupun pemerintahan dan sebagainya yang turut dipaparkan oleh media massa. Dengan kata lain, isu “terorisme” dan “teroris” telah menjadi agenda perdebatan baik di tatanan masyarakat, pemerintah, maupun media massa. Perdebatan tersebut terutama mengenai konsep dan realitas pelabelan kata “teroris” atau “terorisme” terhadap pihak-pihak tertentu, baik secara individu maupun dalam konteks kelompok dalam satu masyarakat global. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, label terorisme pernah ditujukan kepada Pendeta Michael Bray dalam peristiwa pembakaran tempat aborsi di Dover pada tahun 1984 (Jurgensmeyer, 2003). Sedangkan, di Eropa, kata “terorisme” dilabelkan terhadap kelompok nasionalis *Irish Republican Army* (IRA) yang menentang kerajaan Britania pada tahun 1950-an dan 1960-an dalam usahanya menuntut kemerdekaan dari Britania (Engene, 2004). Demikian pula dengan *Liberation Tigers of Tamil Eelam* (LTTE) sebuah gerakan pemberontak Sri Lanka yang juga bernasib sama ketika dilabelkan sebagai “terrorist” karena penentangannya terhadap pemerintahan Sri Lanka (Marks, 2007).

Ini membuktikan bahwa ungkapan “teroris” atau “terorisme” masih dalam perspektif yang berbeda dalam pandangan setiap pihak yang berbeda. Perbedaan perspektif pada setiap individu atau sekelompok orang tertentu sudah tentu menimbulkan perbedaan pemahaman dan kesepahaman terhadap isu “terorisme” atau “teroris” yang dimaksud. Fakta tersebut turut diperkuat oleh pandangan para akademisi yang menyatakan bahwa definisi “terorisme” dan “teroris” masih kabur dan hanya dapat dipahami menurut perspektif dan kepentingan setiap individu atau kelompok tertentu (Ahmad M. Merican, 2002; Chalk, 1996; Romli, 2000; Whittaker, 2004). Namun demikian, berlatarbelakang peristiwa 11 September 2001, istilah “terorisme” telah mengalami distorsi makna pelabelan yang kuat dan melintas ke seluruh pelosok dunia. Kenyataan tersebut di antaranya dapat dilihat seperti pernyataan bahwa “terorisme” dikategorikan sebagai satu kesinambungan penentangan dari “*Islamic extremist*” (De Nelson, 2006:193). Meskipun demikian, De Nelson menilai bahwa pelabelan tersebut merupakan satu pencirian yang tidak jelas dan mencerminkan sikap tidak berhati-hati dalam membedakan

berbagai kelompok dalam gerakan Islam. Kenyataan ini turut pula dipropagandakan oleh media massa dengan menjadikannya sebagai agenda utama berita berkaitan dengan aksi terorisme. Keadaan ini dapat dibuktikan pada hari-hari setelah terjadinya serangan teror 11 September 2001, hampir semua jaringan televisi menyiarkan secara terus-menerus peristiwa tersebut tanpa diselingi iklan komersial (McDonald & Lawrence, 2008). Dengan kata lain pencitraan negatif terhadap isu terorisme yang dikaitkan dengan Islam turut diperankan secara terus-menerus oleh media massa, terutama sekali jaringan media global.

Menariknya lagi, pemberitaan ini dikemas melalui bingkai (*frame*) dan metafora yang ditampilkan oleh media massa global dengan corak pemberitaan yang didasarkan pada kepentingan dan agenda masing-masing, yang membuat peran media menjadi panggung penyiaran atas penyampaian pesan-pesan terorisme (Ganor, 2005). Menurut Entman (1993), pbingkaian (*framing*) dikatakan sebagai kaidah memilih berbagai aspek dari satu realitas yang dapat dilihat dan membuat realitas tersebut lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi. Sedangkan metafora, seperti kata-kata, memiliki kemampuan untuk membina dan merusak, memengaruhi dan mengubah. Sehingga dengan menggunakan metafora, makna-makna dikonstruksi sesuai kata-kata yang dipilih untuk menjelaskan suatu keadaan (Faridah Ibrahim & Ema Mirza Wati Mohammad, 2005:125). Dalam hal ini, Islam menjadi korban eksploitasi, tuduhan dan labelisasi negatif secara sepihak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terkait dengan isu mengenai aksi-aksi terorisme, terutama pasca peristiwa 11 September 2001. Bagaimanapun juga, hal tersebut masih dapat dipertanyakan dan didiskusikan secara proporsional berdasarkan fakta-fakta yang lebih rasional. Banyak pertanyaan yang penting untuk diungkapkan sehubungan dengan hal tersebut di antaranya; apakah perdebatan istilah terorisme dan teroris telah mengalami distorsi makna dari realitas yang sebenarnya? Apakah istilah terorisme dan teroris yang dimaksud bersentuhan dengan agenda kepentingan dari pihak-pihak tertentu? Bagaimana pula kedudukan interpretasi terorisme dan teroris dalam perspektif pbingkaian metafora? Meskipun demikian, faktor kepentingan pihak-pihak tertentu hampir dapat diasumsikan dan dipastikan telah memengaruhi orientasi sudut pandang interpretasi konsep pbingkaian metafora terhadap isu-isu terorisme sehingga membawa dampak kepada cara pandang dunia terhadap realitas terorisme yang sebenarnya. Memerhatikan permasalahan tersebut, penelitian ini

dimaksudkan untuk mengkaji sejauhmanakah corak interpretasi pembingkai metafora terhadap isu-isu terorisme, mampu menggambarkan realitas orientasi pandangan dunia terhadap makna perdebatan isu-isu terorisme.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembingkai

Pembingkai pada mulanya dikemukakan oleh Gregory Bateson (1955-1972), yang melihat bahwa bingkai sebagai struktur konseptual atau peringkat kepercayaan yang menyusun pandangan politik, kebijakan dan wacana yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi suatu realitas (Reese, 2001). Menurut Goffman (1974), bingkai merupakan kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang menuntun individu dalam membaca suatu realitas. Kemudian, pada akhir tahun 70-an, Tuchman (1978) mengeluarkan suatu pemikiran di mana menganalogikan bingkai berita sebagai sebuah jendela (*window*) dunia. Ia memahami bahwa, maksud dari realitas suatu peristiwa tergantung kepada sejauhmana peristiwa terkait dapat dilihat dan dipahami oleh wartawan, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk berita. Selain itu, proses produksi berita dipengaruhi oleh kebijakan redaksi (Faridah Ibrahim, 2003). Ini dapat dipahami bahwa proses konstruksi dan penafsiran suatu realitas peristiwa merupakan kata kunci (*keyword*) dalam memahami konteks pembingkai.

Selanjutnya, Gamson dan Modigliani (1989) melihat pembingkai sebagai cara bercerita (*story line*) atau gugusan yang terancang sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna atas peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Pan dan Kosicki (1993) melalui konsep sosiologi menyatakan bingkai sebagai usaha aktif untuk mengklasifikasikan, mengorganisasikan dan menafsirkan pengalamankehidupansosial. Sedangkan melalui konsep psikologi pula, pembingkai dilihat sebagai penempatan informasi dalam suatu konteks yang unik, sehingga elemen-elemen tertentu dari suatu isu mendapatkan ruang penempatan lebih besar di dalam kognisi individu-individu terkait.

Entman dan Rojecki (1993) melihat pembingkai sebagai pemilihan atas berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa tersebut lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi dalam banyak hal. Proses pemilihan satu realitas tersebut merujuk pada pembingkai Entman (1993) yang mengandung empat dimensi pembingkai, yaitu:

pendefinisian masalah (*define problem*), penafsiran penyebab masalah (*diagnose cause*), penilaian moral (*make moral judgement*) dan rekomendasi penyelesaian masalah (*treatment recommendation*). Sedangkan McQuail (2000) melihat pembingkai sebagai cara memberikan penafsiran terhadap bagian-bagian yang terpisah dari suatu fakta (*isolated items of fact*). Berangkat dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembingkai adalah usaha memilih satu realitas tertentu dari berbagai aspek realitas suatu peristiwa yang dapat diterima sehingga membuat realitas peristiwa itu lebih menonjol dan mempunyai makna.

Metafora

Metafora merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan keseharian manusia, terutama sekali dalam aspek bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi. Metafora berasal dari kata Greek *meta* = bersama/setelah dan *pherein* = timbul, membawa (Charteris-Black, 2004:19). Sedangkan menurut Zhang (2006) metafora adalah satu elemen internal dalam kehidupan keseharian. Metafora bukanlah merupakan hiasan bahasa semata-mata, tetapi juga membentuk perspektif terhadap apa yang dikaitkan dengan suatu realitas. Tegasnya, secara psikologi, metafora dapat dipahami sebagai suatu nilai yang berharga dari pikiran emosional, oleh sebab itu dapat dikategorikan sebagai pengalaman emosional yang melahirkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang konteks masa lalu dan masa sekarang (Modell, 2009). Sejalan dengan ungkapan Lakoff dan Johnson (1980) bahwa metafora menembus kehidupan keseharian, bukan sekadar bahasa tetapi hadir dalam pemikiran dan tindakan, metafora sesungguhnya juga merupakan sistem konseptual keseharian kita dalam konteks pemikiran dan tindakan. Singkat kata, bagi Lakoff dan Johnson, metafora adalah cara untuk memulai pendeteksian terhadap objek tertentu secara terinci, menyusun bagaimana kita menerima, memikirkan, dan apa yang harus kita perbuat.

Selain itu, metafora juga dipahami sebagai kemampuan dalam menampilkan elemen-elemen pesan, tetapi sebaliknya, metafora juga menyembunyikan aspek yang lain (Halverson, 2003:5). Pendapat lainnya menyatakan bahwa metafora dilihat sebagai alat bahasa yang mudah disesuaikan dengan keperluan manusia (Faridah Ibrahim & Emma Mirza Wati Mohammad, 2005:1), dan juga dilihat sebagai satu kiasan yang khas digunakan dalam pembujukan;

ini karena metafora menghadirkan satu cara baru dalam memandang dunia yang menawarkan satu penggambaran yang segar (Charteris-Black, 2004:7). Sedangkan Arlow (1979), menegaskan bahwa komunikasi dan interpretasi atas makna bawah sadar dimungkinkan melalui metafora, sebab bagi Arlow bahasa pada dasarnya merupakan metafora dan ambiguitas dari suatu esensi yang memungkinkan terjadinya transferensi secara cepat atas makna dari satu representasi makna suara yang lain.

Selanjutnya, metafora memiliki beberapa peranan dilihat dari sudut pandang bahasa; dari segi peranan semantik, metafora menciptakan makna baru bagi setiap patah perkataan; dari segi kognitif, metafora berperan dalam mengembangkan satu pemahaman yang berdasarkan analogi; dan dari segi pragmatik metafora berperan dalam menyediakan satu penilaian. Oleh karena metafora memiliki potensi untuk membangkitkan emosi, sehingga sangat sering digunakan dalam gaya bahasa pembujukan (Charteris-Black, 2004:24). Kadangkala metafora sering digunakan sehingga menjadikannya kurang efektif yang disebut sebagai metafora mati. Keadaan ini berdampak dalam dunia kewartawanan di mana metafora digunakan sebagai jalan pintas untuk menjelaskan sesuatu (Faridah Ibrahim & Emma Mirza Wati Mohammad, 2005:1). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan dan dipahami bahwa metafora merupakan alat konstruksi makna baru/lain atas sesuatu dari makna biasa atau makna sebenarnya yang melekat pada sesuatu tersebut.

Terorisme

Berdasarkan tinjauan sejarah perkembangan terorisme, para pakar berpendapat bahwa istilah "terorisme" pertama sekali muncul dan menjadi populer pada abad ke-18, pada masa pemerintahan teror revolusi Perancis dengan tujuan utama untuk menunjuk kepada aksi-aksi kekerasan pemerintah guna menjamin ketaatan rakyat (Chomsky, 1991; Juergensmeyer, 2003). Bahkan, kenyataan lain menyebutkan "terorisme" merupakan suatu teknik yang dikenalkan oleh Sun Tzu 2500 tahun yang lalu; "Membunuh satu orang untuk menggentarkan sepuluh ribu yang lain" (Chakraborti, 2003:316).

Akan tetapi, apabila ditarik garis horizontal diskusi atas terminologi "terorisme" maka yang akan tampak adalah istilah teroris (*terrorist*) dan pejuang kebebasan (*freedom fighter*), yang pada gilirannya maksud dari kedua istilah tersebut tergantung kepada siapa yang melihatnya. Dengan kata lain, masalah tersebut sangat subjektif. Sehingga istilah

"terorisme" sering dikaitkan dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak diakui oleh pemerintah yang secara terpisah berupaya mendapatkan kekuasaan dan pengaruh (Jurgensmeyer, 2003).

Berdasarkan *The Social Science Encyclopedia edisi ke-2*, 1996 definisi terorisme adalah sebagai berikut: "*Terrorism consists of a series of acts intended to spread intimidation, panic and destruction in a population. Individuals and groups opposing a state, or acting on its behalf may carry out these acts. The amount of violence is often disproportionate, apparently random, and deliberately symbolic: to hit a target that would convey a message to the rest of the population*" (1996:872).

Menurut Title 22 dari *United States Code, section 256 f (d)*, terdapat rumusan sebagai berikut:

1. Istilah terorisme berarti aksi kekerasan bermotivasikan politik yang dirancang sebelumnya, yang dilakukan terhadap sasaran bukan tempur (*non-combatant*) oleh agen-agen rahasia atau sub-nasional, yang biasanya dimaksudkan untuk memengaruhi kalangan tertentu
2. Istilah terorisme antar bangsa berarti terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu wilayah
3. Sebutan kumpulan teroris berarti setiap kelompok yang mempraktikkan atau memiliki sub-kelompok yang mempraktikkan terorisme antar bangsa (Sharom TM Sulaiman, 2002:1-2).

Sedangkan menurut makna etimologi, para pakar sepakat bahwa kata "*terror*" berasal dari bahasa latin "*terrere*" yang berarti "menakut-nakuti" (*to terrify*) atau (*to frighten*), atau dengan kata lain "menimbulkan rasa gentar dan rasa cemas" (Bolz et al., 2005; Engene, 2004; Jurgensmeyer, 2003; Wilkinson, 1974).

Terorisme dipahami sebagai suatu tindakan sistematis intimidasi dengan paksa terhadap orang awam atas pencapaian kepentingan politik (Norris et al., 2003:6).

Pendapat lain menyatakan bahwa terorisme adalah tindakan menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut (Manulang, 2006:98).

Ini menunjukkan bahwa tindakan intimidasi, menakut-nakuti, mengancam, dan memberi kejutan kekerasan secara sistematis sehingga dapat

menyebabkan perasaan takut, gentar dan cemas terhadap orang awam adalah kata kunci (*keywords*) dalam memahami maksud perbuatan teror. Dengan demikian, yang dimaksud dengan terorisme adalah suatu aksi perbuatan teror yang sengaja dilakukan oleh siapapun dan dari pihak manapun, dengan tujuan tertentu, sehingga menimbulkan rasa takut, gentar dan cemas terhadap orang awam.

METODE

Kajian ini merupakan kajian pustaka yang menggunakan data sekunder seperti buku-buku, laporan-laporan penelitian, dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan terorisme, pembingkaiannya, dan metafora secara konseptual, teoretis dan empiris. Selanjutnya bahan ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan diskriptif interpretif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu terorisme: Interpretasi pembingkaiannya metafora

Secara teoretis, pembingkaiannya didefinisikan sebagai usaha memilih satu realitas tertentu dari berbagai aspek realitas suatu peristiwa yang dapat diterima sehingga membuat realitas peristiwa itu lebih menonjol dan memiliki makna. Sedangkan metafora dipahami sebagai satu kiasan yang memberi makna atau maksud yang lain dari makna yang sebenarnya.

Dengan kata lain, aspek "makna" merupakan salah satu bentuk kesamaan penekanan yang ada pada konsep pembingkaiannya dan metafora dan menandakan kedua aspek tersebut memiliki kaitan baik disadari ataupun tidak. Seperti diketahui bahwa dimensi "makna" merupakan hal yang penting dalam setiap segmen penampilan pembingkaiannya dan metafora berkaitan dengan satu realitas tertentu.

Menurut Schon (Charteris-Black, 2004:22) terdapat hubungan dekat antara metafora dan proses perangkaan bingkai, yaitu satu perspektif yang memuat satu isu sosial yang ditentukan melalui cara isu sosial tersebut ditampilkan secara metafora. Oleh karena itu, peranan metafora, khususnya berkaitan dengan kebijakan sosial, merujuk kepada dua hal yaitu; *pertama*, perspektif atau bingkai, atau cara kita melihat sesuatu dalam proses tertentu; dan *kedua*, merupakan proses timbulnya satu perspektif dunia baru.

Dengan perkataan lain, proses perangkaan bingkai suatu isu, kemudian ditampilkan secara metafora akan memberi dampak terhadap konstruksi makna atas

isu terkait. Meskipun metafora memiliki kemampuan untuk menampilkan elemen-elemen pesan tertentu, tetapi metafora juga menyembunyikan aspek yang lain (Halverson, 2003:5). Di antara contoh-contoh bentuk interpretasi pembingkaiannya metafora dalam perdebatan isu terorisme terutama di dalam teks komunikasi dapat dijelaskan seperti berikut di bawah ini.

Axis of Evil

Telah dipaparkan dalam bagian terdahulu bahwa pada dasarnya diskusi mengenai pembingkaiannya dan metafora adalah perbincangan tentang konstruksi makna simbolik atas suatu realitas sosial tertentu. Isu terorisme merupakan salah satu bentuk realitas yang telah mengalami proses penafsiran metafora dan dikemas dalam sebuah kemasan bingkai yang halus serta mengandung maksud-maksud tertentu.

Ungkapan "*axis of evil*" merupakan bagian dari ungkapan metafora yang dibingkai ke dalam wacana perdebatan "terorisme". Dikatakan mengandung makna metafora karena ungkapan tersebut memiliki makna non-literal dan mengandung maksud tertentu.

Dalam kajian Halverson (2003) mengenai dampak metafora dalam perang melawan terorisme mengungkapkan bahwa tidak hanya dalam retorika politik tetapi juga dalam kebijakan politik luar negeri, metafora membawa dampak kepada cara orang mendefinisikan dan melakukan tindakan perang. Halverson mengkaji tujuan dan maksud makna metafora dalam bahasa; bagaimana metafora membentuk kebijakan luar negeri; dan bagaimana metafora telah digunakan oleh para politisi sejak peristiwa 11 September 2001 sampai pidato resmi Presiden Bush pada bulan Januari 2002.

Ungkapan "*axis of evil*" dijadikan sebagai salah satu fokus oleh Halverson dalam kajian tersebut. Halverson mengungkapkan bahwa kenyataan "*axis of evil*" merupakan sindiran Presiden Bush yang ditujukan kepada negara-negara brutal (*rogue states*) yang merusak hubungan luar negeri Amerika Serikat dan Inggris. Terutama sekali diarahkan terhadap negara-negara yang menyokong terorisme, seperti Korea Utara. Pendapat Halverson tersebut didasarkan perspektif retorika politik dan metafora dalam menganalisis retorika-retorika para politikus mengenai pandangan mereka terhadap isu 11 September 2001.

Selain itu, tendensi penafsiran ungkapan metafora "*axis of evil*" juga merupakan bagian dari wacana strategi keamanan nasional dan kebijakan

publik. Zhang (2006) melakukan satu kajian mengenai metafora sebagai pesan strategi dari diplomasi publik Amerika Serikat pasca 11 September 2001.

Dalam kajian tersebut Zhang melakukan analisis terhadap metafora-metafora utama yang diciptakan oleh pihak pemerintah Amerika Serikat dalam mendefinisikan realitas dunia pasca 11 September 2001. Istilah *"axis of evil"* merupakan salah satu bentuk metafora yang dimaksud dan dianalisis oleh Zhang. Menurut Zhang ungkapan *"axis of evil"* adalah satu transformasi metafora dari ungkapan *"Rogue State"* yang kemudian berganti menjadi *"State of Concern"* dan pada akhirnya terbentuklah ungkapan metafora *"axis of evil"*. Dengan merujuk kepada pernyataan resmi Bush pada tanggal 29 Januari 2002, Zhang berpendapat bahwa makna di balik ungkapan *"axis of evil"* ditujukan kepada negara-negara seperti Iran, Irak dan Korea Utara serta sekutu-sekutu teroris karena dianggap sebagai ancaman terhadap kedamaian dunia (Zhang, 2006:33). Secara teoretis, Zhang menyimpulkan bahwa metafora memiliki keaslian dalam strategi keamanan nasional Amerika Serikat sehingga metafora tetap konsisten dengan misi jangka panjang negara tersebut dalam mempromosikan demokrasi dan kebebasan di dunia dan menjadi elemen yang penting sebagai strategi keamanan nasional.

Selain itu, Heradstveit dan Bonham (2007) meyakini bahwa konsep metafora mampu mengubah cara pandang terhadap dunia. Oleh karena itu, mereka berkeyakinan bahwa ungkapan *"axis of evil"* mampu memberikan satu perspektif baru tentang dunia dan juga dinilai membawa masalah yang serius. Kedaan ini mendorongnya untuk melakukan penelitian tentang ungkapan metafora *"axis of evil"* yang terkandung di dalam pidato resmi George W. Bush pada bulan Januari 2002 yang ditujukan kepada Iran, Irak dan Korea Utara.

Heradstveit dan Bonham memfokuskan penyelidikan mereka untuk mengetahui secara pasti dampak metafora *"axis of evil"* terhadap citra masyarakat Iran dan wacana politiknya. Dari 18 elit politisi pembangkang Iran yang diwawancarai, Heradstveit dan Bonham menemukan fakta bahwa metafora *"axis of evil"* memiliki dampak terhadap wacana politik di Iran dan telah memperkokoh posisi retorika konservatif *vis-a-vis* para reformis dengan menghidupkan bahasa militan revolusioner seperti label *"Great Satan"* untuk Amerika Serikat, sebagai sasaran tekanan teokratis dan konservatif. Heradstveit dan Bonham berkesimpulan bahwa implikasi dari satu pengalaman budaya dan sejarah

telah mengarahkan orang-orang Amerika Serikat dan Iran dalam memahami konteks metafora.

War on Terror

Selain *"axis of evil"*, ungkapan *"war on terror"* adalah satu di antara bentuk metafora lain yang sering dibingkai dalam isu terorisme. Ungkapan tersebut menjadi populer di awal abad ke-21, terutama pada tanggal 13 September atau dua hari selepas serangan 9/11 di New York dan Washington D.C., ketika Presiden George W. Bush menyatakan bahwa Amerika Serikat melancarkan kampanye *"war on terror"* (Lumis, 2008). Namun demikian, ungkapan tersebut menimbulkan perdebatan karena diyakini bukan suatu ungkapan biasa, tetapi bentuk metafora yang mengandung makna dan maksud tertentu. Kenyataan tersebut mendorong para sarjana untuk mengungkapkan makna yang tersirat di balik ungkapan tersebut.

Lumis (2008) dalam tulisannya bertajuk *"terror and the terrorist"* mengungkapkan bahwa dalam wacana politik Amerika Serikat, perkataan *"war"* sering digunakan secara metafora, seperti *"war on Poverty"* dan *"war on Drug"* serta berbagai istilah lain seperti *"war on crime"*. Lumis lebih jauh mempermasalahkan bahwa andai kata *"terror is a tactic"* lalu bagaimana mungkin dapat disebut *"war on a tactic?"* Dari sudut pandang kalangan elit pimpinan pemerintah, Lumis menambahkan bahwa *"terrorism"* adalah sesuatu yang timbul dari sejenis manusia yang disebut sebagai *"terrorist"*. Maka, *"war against terror"* akan berakhir apabila semua *"terrorist"* dibunuh dan dipenjarakan hingga tinggal orang-orang biasa. Perbedaan antara *"war against terror"* dengan perang biasa (*ordinary war*) bukan pada ukuran seberapa besar kekuatan musuh, tetapi membunuh atau memenjarakan musuh perang *"enemy combatants"* sebagai ukuran.

Dari aspek pemingkaiannya metafora, ini menjadi bukti nyata bahwa *"war on terror"* merupakan satu istilah yang mengandung makna dan maksud tertentu yang hanya mampu dipahami oleh pihak tertentu saja, terutama pihak yang menciptakan dan menyebarkan metafora tersebut. Seperti dicontohkan oleh Halverson (2003) dengan mengutip pernyataan resmi Bush pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa musuh (*enemy*) dalam *"war against terror"* adalah *"terrorist"*, atau ditujukan kepada siapapun yang melakukan tindakan brutal menentang Amerika Serikat, siapapun yang mensponsori, memberikan perlindungan, dan menentang kebebasan (*freedom*) di manapun mereka berada.

Selain itu, Fabiano (2009) dalam kajian *“terrorism and its metaphors”* telah melakukan analisis meta terhadap ungkapan metafora isu-isu terorisme untuk mengenal secara pasti bagaimana metafora digunakan dalam retorika politik Amerika Serikat. Ia mengungkapkan bahwa ungkapan *“war on terror”* pada prinsipnya adalah metafora yang digunakan oleh Pemerintah Bush untuk menyamakan terorisme Amerika Serikat agar diterima sebagai kebijakan negara. Dua dekade sebelumnya istilah *“war on terror”* merujuk pada tujuan utama penentangan pemerintah Amerika Serikat dan jaringannya, *“Islamic fundamentalist fighters”* terhadap Uni Soviet di Afghanistan. Istilah *“war on terror”* disebar oleh Amerika Serikat terhadap para pelindung teroris yang dipilih secara tepat sebagai sasaran musuh. Artinya, bingkai metafora *“war on terror”* dihasilkan secara sadar bagi kepentingan kebijakan Amerika Serikat dalam interaksinya dengan dunia luar.

Selain itu, ungkapan *“war on terror”* adalah retorika politik Amerika Serikat juga menjadi fokus bagi Reese dan Lewis (2009) dalam satu kajiannya *“framing the war on terror: The internalization of policy in the US press.”* Mereka berpendapat bahwa berbagai referensi dalam wacana berita mengenai *“war on terror”* menunjukkan satu hubungan, sering atau tidak, dengan penyusunan kebijakan bingkai. Maka, dari perspektif konstruksi budaya dan dengan analisis interpretif, Reese dan Lewis berusaha mengetahui bagaimana pemaparan berita *“war on terror”* dalam laporan *US Today* selama kurun waktu 2001 hingga 2006. Mereka menemukan teks berita yang menunjukkan bahwa bingkai diinternalisasi oleh *US Today*. Mereka juga berpendapat bahwa ungkapan *“war on terror”* lebih dari sekadar label kebijakan, tetapi merupakan satu kekuatan prinsip pengorganisasian dan perluasan dari cara wartawan menstrukturkan dunia di dalam laporan dan analisis mereka.

Walaupun demikian, Hulsse dan Spencer (2008) berpendapat bahwa meskipun hasil kajian terorisme yang berfokus kepada teroris cukup meyakinkan, namun mereka berasumsi bahwa cara pandang yang berbeda dapat menghasilkan sesuatu yang lebih produktif. Dari perspektif konstruksionis, terorisme merupakan suatu konstruksi sosial. Sedangkan teroris adalah produk dari sebuah wacana. Dalam konteks ini, Hulsse dan Spencer mengubah cara berpikirnya dari perspektif aktor-sentris ke wacana-sentris. Hulsse dan Spencer melakukan telaah terhadap konstruksi metafora al-Qaida pada surat kabar populer German setelah peristiwa serangan

teroris di New York dan Washington (2001), Madrid (2004) dan London (2005). Hulsse dan Spencer menemukan bahwa pada mulanya terorisme dikategorikan sebagai perang, tetapi sejak tahun 2004 sampai saat ini prinsip metafora berubah dari *“perang”* ke *“kriminal”*, sehingga menempatkan status al-Qaida sebagai sebuah organisasi kriminal dan bukan organisasi militer. Hal ini juga telah mentransformasikan status organisasi al-Qaida dari sebagai ancaman luar ke ancaman dalam negeri, dan pada gilirannya mengubah tindakan penanggulangan terorisme (*counter-terrorism*) dari ranah militer ke ranah hukum.

Keberagaman interpretasi metafora terorisme dapat juga ditelusuri dari sudut pandang makna psikologis. Seperti Kruglanski et al. (2008) pada satu kajian tentang penggunaan metafora dalam pembingkai penanggulangan terorisme meliputi empat metafora utama mengenai penanggulangan terorisme, yaitu berkaitan dengan perang, penegakan hukum, penanggulangan epidemik sosial dan proses pengurangan sifat prejudis. Kruglanski et al. lebih jauh mengungkapkan bahwa metafora perang bersifat total dan ekstrem, yang didasarkan kepada argumen luasnya dampak kerusakan yang ditanggung dan kedukaan atas rasa nasionalisme akibat dari serangan atas peristiwa 11 September 2001.

Maksud metafora penegakan hukum adalah keharusan mempertahankan sumber penghasilan dengan bentuk-bentuk lain dari keperluan sosial. Keuntungan utama penegakan hukum dalam ruang lingkup peperangan adalah keaslian fokusnya terhadap teroris yang sebenarnya dengan mengurangi dampak jatuhnya korban pada pihak yang tidak berdosa.

Dari segi maksud, metafora penanggulangan epidemik sosial berkaitan dengan model epidemik kesehatan publik yang sangat berguna terhadap epidemik teror dari serangan 11 September 2001. Model tersebut berguna untuk memisahkan antara agen luar, ketahanan si tuan rumah, lingkungan tempat berkumpul dan sarana yang mendorong transmisi wabah penyakit. Selanjutnya, proses pengurangan sifat prejudis mengarah kepada suatu interaksi antara dua komunitas yang sedang berada dalam keadaan konflik yang dapat menyebabkan timbulnya terorisme.

Freedom Fighter

Istilah *“freedom fighter”* juga merupakan metafora yang sering dibingkai dalam perbincangan isu terorisme. Ini dikarenakan konstruksi makna *“freedom fighter”* berlawanan dengan makna

"terrorist", namun hampir tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dijelaskan dalam suatu ungkapan "*one man's terrorist is another man's freedom fighter*" (Jenkins 2003). Kekaburan makna menandakan kedua istilah tersebut memiliki makna metafora yang dapat dipahami menurut penilaian subjektif individu atau pihak yang berkepentingan.

Menurut Westrate (Bailey & McGill, 2008: 85), kemunculan pertama kali istilah pejuang kebebasan berdasarkan ciptaan kelompok "*Lohamei Heru Israel*" atau "*freedom fighters for Israel*". Kelompok ini bergerak di Inggris dan dikenal dengan sebutan "*Stern Gang*". Penerimaan antarbangsa terhadap sebutan mereka dengan istilah "*freedom fighter*" dipicu oleh besarnya rasa bersalah yang bercampur dengan perasaan hina atas kegagalan mengatasi *holocaust* yang disponsori oleh rezim Nazi Jerman. Istilah "*freedom fighter*" juga digunakan untuk memaparkan anggota-anggota kelompok *Front de Liberation National (FLN)*, yang berjuang untuk pembebasan Algeria dari pendudukan Perancis.

Bailey dan McGill (2008) adalah salah satu di antara yang ikut merisaukan apabila istilah terorisme sudah digunakan terlalu leluasa, sehingga terkesan telah kehilangan nilai. Keadaan ini memicu mereka untuk membuktikan "*freedom fighter*" bukanlah nama lain dari "*terrorist*". Mereka berasumsi bahwa terdapat perilaku dan tindakan tertentu yang dapat membedakan antara kedua konsep tersebut. Dalam kajiannya bertajuk "*Freedom fighters or terrorist by another name?*" mereka berusaha mengkaji IRA sebagai objek studi dalam upayanya memisahkan dan mengidentifikasi perubahan perilaku kelompok tersebut dari pejuang kebebasan hingga ke aksi terorisme dengan pendekatan kronologis, dengan memberi penilaian dari segi bentuk dukungan, tujuan asas pembebasan, target dan kawasan operasi. Bailey dan McGill memahami makna pejuang kebebasan (*freedom fighter*) sebagai suatu usaha perlawanan atas penindasan pemerintah (*tyranny*), dengan dukungan yang populer menjadikan pembebasan sebagai tujuan utama, institusi tentara dan pemerintah sebagai sasaran, dan kawasan operasi yang bersifat terbatas dalam kawasan sendiri. Mandela adalah salah satu orang yang dicontohkan oleh Bailey dan McGill sebagai tokoh pejuang, yang berhasil menguburkan Apartheid hingga menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Namun demikian, Bailey dan McGill memiliki pandangan tersendiri terhadap "*one man's terrorist is another man's freedom fighter*" yang dianggapnya hanya merupakan satu ungkapan, karena "*freedom*

fighter" pada hakikatnya menginginkan kuasa politik dan berkeinginan untuk mengambil bagian dalam proses penentuan suatu kebijakan negara, serta menginginkan penindasan terhadap mereka harus dihentikan demi kedamaian.

Selangkah mendahului Bailey dan McGill, Ganor (2002) juga telah berupaya menguraikan duduk permasalahan atas perdebatan antara "*freedom fighter*" dan "*terrorists*". Melalui tulisannya yang berjudul "*Defining Terrorism: Is one man's terrorist another man's freedom fighter?*", Ganor mengungkapkan kesamaran makna antara kedua istilah tersebut berangkat dari perbandingan kronologis atas suatu bentuk tindakan, target dan tujuan yang akan dicapai.

Proses perbandingan yang dimaksud adalah istilah *terrorism vs guerrilla warfare*. Istilah "*terrorism*" memiliki makna konotasi yang amat sangat negatif. Sedangkan *guerrilla warfare* dinilai mengandung makna yang lebih netral. Dari segi cara yang digunakan, aksi terorisme dilakukan secara individual dan bisa dilakukan oleh siapapun. Dari segi target, menurut Ganor teroris ditujukan kepada masyarakat sipil dan atas tujuan politik dengan cara-cara yang anarkis. Berbeda dengan *guerilla warfare* yang dilakukan di kawasan kota dan kampung, sasaran yang dituju adalah anggota dan infrastruktur militer dengan tujuan politik, pergerakannya disifatkan sebagai pejuang kebebasan atau revolusioner. Bagaimanapun juga, Ganor menegaskan bahwa kesukaran dalam mendudukan satu definisi terorisme terkadang sama beratnya dengan menentang terorisme itu sendiri. Hal ini dapat dicontohkan seperti argumen Mahathir Mohammad (2003), mantan Perdana Menteri Malaysia, yang mengatakan bahwa *Jewish Haganah, Irgun Zeva'i Le'umi* dan *Stern Gang* dulu juga dianggap sebagai teroris dan diburu oleh Inggris, tetapi akhirnya menjadi pemimpin Israel yang dihormati. George Washington juga pernah dilabelkan sebagai teroris oleh Inggris, karena Inggris mengingkari perlawanan Amerika Serikat ketika itu (Jenkins, 2003:22).

Religious Fanatic

Istilah-istilah yang mengarah dan mengandung makna "*religious fanatic*" seperti "*extremist*", "*radical*", "*bombers*", dan "*militant*" merupakan berbagai bentuk metafora yang kerap dibingkai dan berlatarbelakang agama. Istilah tersebut membawa maksud tertentu apabila dikaitkan dengan isu terorisme, dan menjadi sensasi apabila menjadi topik utama pemberitaan media massa. Namun

yang memprihatinkan adalah agama Islam menjadi korban pencitraan berunsur metafora negatif. Seperti diketahui bahwa sejak peristiwa 11 September 2001, terorisme dalam konteks “*war on terror*” telah dikategorikan sebagai suatu kesinambungan tantangan dari “*Islamic extremist*” (De Nelson, 2006:193).

Isu “*Islamic extremist*” tersebut bagi De Nelson merupakan premis dalam usahanya menelusuri isu terorisme yang dipaparkan oleh media massa, terutama *New Straits Times*, *Malaysia* dan *Straits Times*, Singapura. Dalam perspektif analisis bingkai media, De Nelson mengungkapkan bahwa wacana global atas “*war on terror*” dilihat sebagai bingkai utama dalam semua liputan berita. Lebih dari itu, faktor kontrol sosial menjadi penting dalam memberantas keganasan dengan media yang memainkan peranan penting dalam menyampaikan pesan tersebut.

Sedangkan melalui perspektif semantik, Faridah Ibrahim dan Emma Mirza W. Mohamad (2005) mengungkapkan bahwa setiap individu memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap kata-kata seperti “*terrorism*”, “*fundamentalist*”, “*Islam*”, “*war on terror*”, “*freedom fighter*”, dan juga diyakini sebagai kata-kata yang membentuk makna ke arah ketidak-berprikemanusiaan atau berprikemanusiaan individu-individu, peristiwa-peristiwa, bangsa atau objek-objek tertentu. Keadaan tersebut mendorong mereka untuk berusaha mengungkapkan makna kata-kata tersebut dalam perspektif metafora. Melalui pendekatan analisis kandungan terhadap empat surat kabar utama di Malaysia, *New Straits Times*, *The Star*, *Utusan Malaysia* dan *Berita Harian*, menghantarkan mereka kepada satu simpulan bahwa kata-kata metafora digunakan pada surat kabar berbahasa Inggris dan Melayu tersebut berbeda, tetapi menyatu dalam makna dan konteks objek atau peristiwa yang dipaparkan mereka.

Kesatuan makna metafora dengan konteks objek dan peristiwa yang dipaparkan oleh pihak tertentu, terutama dalam isu agama dan terorisme, juga dapat dilihat sebagai sebuah realitas sosial yang dicatat sebagai bukti sejarah. Seperti Mansour Al-Eisa (2003) melalui analisis sejarahnya menegaskan bahwa “agama tidak menyebabkan terorisme tetapi sebagai mangsa dari terorisme.” Mansour Al-Eisa mencontohkan bahwa munculnya ekstremis Islam adalah hasil dari pendudukan Eropa terhadap Timur Tengah dan dunia Islam, yaitu ketika Britania dan Perancis melalui kebijakan yang salah (*Sykes-Picot Accord* 1916) telah membagi dunia Arab menjadi

negara-negara kecil (*petty state*). Keadaan ini bagi Mansour Al-Eisa telah memunculkan konflik isu perbatasan antar negara, seperti konflik antara India dan Pakistan, Irak dan Iran hingga menyebabkan peperangan. Selain itu, isu pendirian negara Israel di jantung dunia Arab pada tahun 1948 melalui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Britania mengakibatkan tragedi pelarian rakyat Palestina. Akibat dari ini semua telah melahirkan “kelompok pejuang pembebasan” (*freedom fighter organization*) untuk mendapatkan kemerdekaan, seperti *Ikhwanul Muslimin* di Mesir yang dibentuk pada 1928, dimotori oleh seorang guru agama Hasan Al-Banna sebagai salah satu jawaban terhadap penjajahan dunia Muslim oleh Barat. Tetapi kelompok ini kemudian dilabel oleh Barat sebagai kelompok teroris dan tindakan perjuangan mereka dilabelkan sebagai aksi terorisme, sehingga muncul istilah “*Islamic terror*” (Mansour Al-Eisa, 2003:8)

Sedangkan dalam perspektif analisis dimensi agama, Weeden (2004) menyatakan bahwa tumbuhnya pengaruh keragaman agama, ideologi, sejarah, dan elemen militansi dalam hubungannya dengan nasionalisme akan memperluas pemikiran strategis komando pejuang (*the combatant commanders*) dan perencanaan perang terhadap terorisme yang tidak beraturan. Weeden mempertegas bahwa analisis terhadap perbedaan agama di tingkat regional menjadi penting bagi budaya intelijen, karena dalam konteks “*global war on terrorism*” perlu dipahami bahwa Islam bukanlah agama monolitik, oleh sebab itu Islam dan Militan Islam tidak dapat dilihat melalui kaca mata yang sama. Dari segi ideologi, Weeden berpendapat bahwa agama telah memberikan metafora perang kosmis, dan citra perjuangan spiritual pada setiap agama yang nampak pada pemunculan simbol seperti perjuangan antara “*good*” vs “*evil*”. Dari aspek perang suci, ekstremis juga dikenal dalam agama Kristen, Yahudi, Islam, Hindu, Budha, Konfusianisme, dan Sikhisme. Sebab setiap agama memiliki individu dan kelompok yang menafsirkan kitab sucinya untuk mereka sendiri bagi sebuah peperangan antara “*good*” and “*evil*” (Weeden, 2004:13).

Perdebatan mengenai keterlibatan unsur agama dalam isu aksi terorisme juga semakin terlihat dalam proses klarifikasi para pemimpin Barat ketika berlangsung peristiwa 11 September 2001. Seperti dinyatakan Kibble (2002), bahwa serangan 11 September 2001 adalah bukti perseteruan agama. Meskipun Presiden Amerika Serikat, George Bush dan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair telah berulang kali

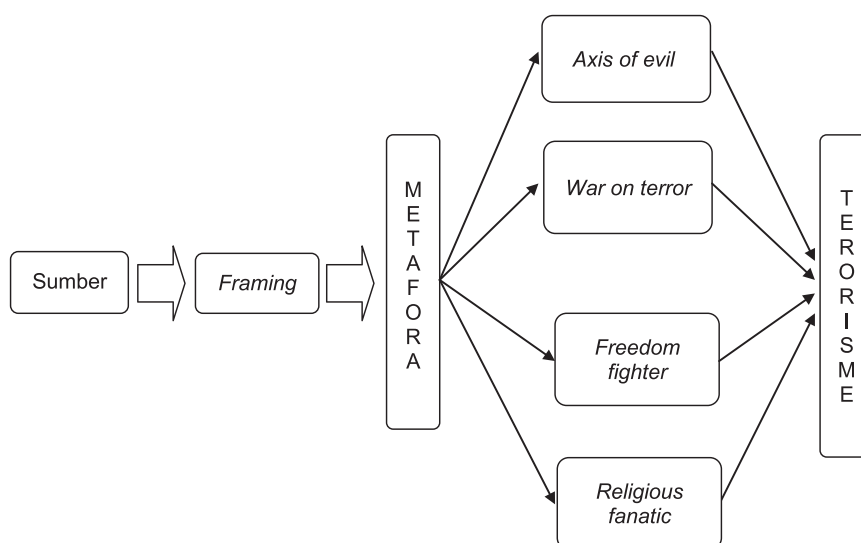
mengatakan bahwa perang Sekutu di Afghanistan bukanlah perang terhadap Islam, tetapi Islam tetap dilabelkan terkait dengan peristiwa 11 September 2001 dan peristiwa-peristiwa susulan lainnya. Kibble dengan perspektif *“clash of civilization”* yang dicetuskan oleh Samuel Huntington, berpendapat bahwa perbedaan prinsip fundamental peradaban Barat dengan peradaban lainnya menjadi faktor dominan dalam konflik peradaban. Seperti dalam isu agama, perseteraan antara fundamentalis Islam dan Barat terletak pada tataran nilai-nilai Barat, seperti kebebasan bersuara, hak asasi manusia, dan demokrasi sebagai asas budaya mereka. Sedangkan fundamentalis Islam kadang-kadang menolaknya, karena bagi mereka negara sebaiknya berdasarkan Syariat. Contoh lain, seperti fundamentalis Islam menyerukan para peminum alkohol dan pejudi harus dikenakan hukum hudud seperti potong tangan, sedangkan Barat melihat ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia (Kibble, 2002:41).

Ini jelas menunjukkan bahwa makna atas istilah-istilah *“religious fanatic”* tersebut menyatu dengan konteksnya yang melahirkan bingkai metafora dalam perspektif yang berbeda-beda. Seandainya agama Islam sebagai korban dalam pencitraan metafora negatif oleh Barat, maka dapat disifatkan sebagai bentuk pembingkai metafora dengan tujuan untuk membentuk opini publik yang sensitif dan tidak objektif. Seperti pernyataan Esposito (2003) bahwa persepsi Barat terhadap Islam dan gerakan-gerakan Islam masih sensitif. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Jenkins (De Nelson, 2006:53), bahwa pemahaman terhadap Muslim sebagai sumber ancaman bagi Barat merupakan suatu

yang hakiki dalam wacana *Eurocentric* (‘Eropa-sentris’). Ini bermakna, pelabelan-pelabelan seperti pembingkai metafora negatif terhadap Islam merupakan bentuk prejudis yang disengaja secara terus-menerus dengan maksud merusak citra dunia Islam.

Dengan demikian, maka ditemukannya istilah-istilah seperti *“axis of evil”*, *“war on terror”*, *“freedom fighter”*, dan *“religious fanatic”* merupakan bentuk-bentuk istilah yang telah mengalami proses pembingkai metafora sehingga memiliki makna dan tujuan sesuai konteks dan keadaan. Sedangkan, maksud pembingkai metafora lebih terfokus pada hasil daripada proses pemilihan simbol-simbol, istilah-istilah, atau ungkapan-ungkapan tertentu yang memiliki makna metafora atau bukan makna literal, serta mengikuti konteks dan keadaan yang ada. Seperti telah dikatakan bahwa pada masa rezim George Bush, ditemukan ungkapan *“axis of evil”* bukanlah ungkapan biasa, selain mengandung makna metafora, ungkapan tersebut juga sengaja dipilih dan dipropagandakan untuk menyindir musuh-musuh Amerika Serikat, seperti Iran dan Korea Utara karena dinilai tidak patuh kepada kebijakan politik luar negeri mereka.

Istilah *“war on terror”* juga ditampilkan sebagai satu metafora yang sengaja dibingkai dan ditonjolkan oleh Amerika Serikat, karena istilah tersebut mengandung makna strategis bagi pemerintahan Bush untuk menyamakan terorisme agar diterima sebagai kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Begitu juga dengan istilah-istilah *“religious fanatic”* seperti *“Islamic extremist”*, *“Muslim hardliners”*,



Gambar 1. Tipologi Pembingkai Metafora

Sumber: *Theorizing* Penulis.

"*Muslim radical*", dan "*Islamic militant*" merupakan bingkai metafora negatif terhadap Islam dan bentuk sikap prejudis negatif yang terus menerus dipilih dan ditonjolkan oleh musuh Islam dengan maksud merusak citra dan mengaburkan makna pesan Islam yang sebenarnya. Sedangkan istilah "*freedom fighter*", meskipun tergolong memiliki makna metafora yang positif, tetapi terkadang pihak yang dilabel sebagai "*freedom fighter*" sering kali juga dilihat sebagai "*terrorist*" oleh pihak lawan. Oleh sebab itu kedua istilah tersebut sangat bergantung kepada pandangan subjektif setiap individu yang berkepentingan.

Dengan demikian, dalam konteks interpretasi pembingkai metafora dan isu terorisme, maka maksud istilah-istilah "*axis of evil*", "*war on terror*", "*freedom fighter*", "*religious fanatic*" merupakan bentuk-bentuk istilah yang telah mengalami proses pembingkai sehingga memiliki makna metafora atau dapat disebut sebagai bentuk "bingkai metafora" dan mewakili simbol-simbol makna terorisme. Lebih jelasnya, tipologi proses pembingkai metafora tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

SIMPULAN

Perdebatan dan perselisihan paham mengenai isu-isu terorisme didorong oleh faktor tidak adanya kata sepaham mengenai konsep terorisme itu sendiri yang timbul di kalangan masyarakat, hal ini terutama sekali disebabkan oleh perbedaan agenda kepentingan setiap golongan masyarakat terhadap isu tersebut.

Faktor pembingkai dan metafora yang dilekatkan pada setiap isu-isu terorisme turut menyumbang sukarnya mendapat satu kesepahaman makna yang terkandung di dalam isu-isu yang dimaksud. Seperti istilah-istilah "*axis of evil*", "*war on terror*", "*freedom fighter*", dan "*religious fanatic*" bukanlah satu istilah biasa, tetapi membawa makna metafora yang mengandung maksud lebih dalam dari sekadar makna harfiah atau literal. Faktor situasi dan kondisi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menggambarkan maksud metafora yang terkandung dibalik istilah-istilah tersebut. Ketika istilah-istilah tersebut melebur ke dalam satu keadaan tertentu hingga berkoherensi dengan keadaan tersebut, niscaya mampu melahirkan satu bentuk realitas baru dan lengkap dengan makna baru karena istilah-istilah tersebut dibawa ke dalam satu keadaan yang baru. Seperti dalam hal ini istilah "*axis of evil*", "*war on terror*", "*freedom fighter*", dan "*religious fanatic*" tidak lagi mencerminkan makna literal semata, namun telah dieksploitasi oleh pihak

Barat dengan latar belakang isu terorisme pasca peristiwa 11 September 2001, membuat makna atas istilah-istilah tersebut terbingkai dalam konteks yang berbeda-beda sebagai retorika politik, sarana kebijakan luar negeri, pondasi strategi keamanan nasional dan sebagai arah kebijakan publik yang melekat pada setiap pihak yang menggunakannya.

Seperti halnya istilah "*axis of evil*" yang merupakan ungkapan yang dideklarasikan oleh Amerika Serikat dan dilabelkan kepada pihak-pihak yang tidak bersehaluan dengan arah kebijakan luar negerinya, terutama terhadap Iran, Irak dan Korea Utara. Ketika istilah "*war on terror*" adalah nyata sebagai kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan juga digunakan sebagai strategi mengukuhkan keamanan nasional di bawah pemerintahan George Bush yang dideklarasikan pasca peristiwa 11 September 2001. Manakala istilah "*freedom fighter*", membawa makna yang jauh lebih kompleks di bandingkan yang lain, sebab ungkapan tersebut hadir dengan sisi kontradiksi yaitu "*terrorist*", seperti dalam pernyataan "*one man's terrorist is another man's freedom fighter*". Bagaimanapun juga kedua istilah "*terrorist*" dan "*freedom fighter*" tersebut tetap hadir dalam makna realitas yang terpisah satu sama lainnya. Selanjutnya ungkapan yang berunsur "*religious fanatic*" seperti "*Islamic extremist*", "*Muslim hardliners*", "*Muslim radical*", dan "*Islamic militant*" dibingkai dan dijadikan muatan agenda propaganda pihak Barat yang membawa makna metaforis negatif terhadap dunia Islam, terutama dibingkai dalam wajah sikap prejudis terhadap agama dan umat Islam. Istilah-istilah tersebut juga dituduh oleh pihak Barat sebagai ancaman terhadap nilai kebebasan, hak asasi manusia dan demokrasi. Keadaan tersebut merusak citra dan mengaburkan makna Islam yang sebenarnya. Apapun dan bagaimanapun konstruksi makna pembingkai metaforis yang timbul dalam istilah-istilah tersebut bermula dari satu pernyataan Barat yang sulit untuk diterjemahkan dalam konteks "*war on terror*", yaitu tercermin dalam ungkapan "*either you are with us or against us.*"

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Murad Merican (Ed.). (2002). *Civilization and terrorism: The ambivalence of interpretation*. Selangor: Institute of Knowledge Advancement (InKA), University Eknologi MARA.
- Arlow, J. (1979). Metaphor and the psychoanalytic situation. *Psychoanalytic Quarterly*, 48: 363-385.

- Bailey, W. & McGill, A. (2008, December 1). Freedom fighters or terrorist by another name? *Proceedings of the 1st Australian Security and Intelligence Conference, SECAU—Security Research Centre Edith Cowan University Mount Lawley Campus, Perth Western Australia.*
- Bolz, F. Jr., Dudonis, J. K., & Schulz, P. D. (2005). *The Counter terrorism Handbook: Tactics, Procedures, and Techniques*. Boca Raton: CRC Press.
- Chakraborti, T. (2003). Terrorism and the ASEAN states a classificatory and prescriptive analysis. In Mishra, O. & Ghosh, S. (Eds.), *Terrorism and low intensity conflict in South Asian region* (pp. 316-356). New Delhi: Manak Publications PVT. Ltd.
- Chalk, P. (1996). *West European Terrorism and Counter-terrorism*. London: Mcmillan Press Ltd.
- Charteris-Black, J. (2004). *Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis*. New York: Palgrave Macmillan.
- Chomsky, N. (1991). *Menguak tabir terorisme internasional* (Hamid Basyaid, Pentj.). Bandung: Mizan.
- De Nelson, S.A. (2006). News reporting on terrorism in Malaysia and Singapore. *Media Asia*, 33(3-4): 192-200.
- Engene, O.J. (2004). *Terrorism in Western Europe*. Northampton: Edgar Elgar Publishing, Inc.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43: 51-58.
- Entman, R. M. & Rojecki, A. (1993). Freezing out the public: Elite and media framing of the U.S. anti-nuclear movement. *Political Communication*, 10(2): 155-173.
- Esposito, J. (1987). *Islam in Asia: Religion, Politics and Society*. New York: Oxpord University Press.
- Fabiano, M. (2009). Terrorism and its metaphors. *The University of Endinburgh Postgraduate Journal of Culture and the Arts*. Diakses dari <http://forum.llc.ed.ac.uk/issue2/fabiano.html>.
- Faridah Ibrahim. (2003). Pengaruh pengurusan akhbar ke atas bilik berita. Dalam Samsudin A. Rahim (Pnyt). *Kumpulan esei: Isu-isu komunikasi* (hal. 267-284). Bangi: Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Faridah Ibrahim & Emma Mirza Wati Mohamad. (2005). War heroes. Terrorists, freedom fighters and fragile economy; from metaphor to “WMDs”. *Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication*, 21: 121-134.
- Gamson, W. A. & Modigliani, A. (1989). Media discourse and public opinion on nuclear power: A constructionist approach. *The American Journal of Sociology*, 95(1): 1-37.
- Ganor, B. (2002). Defining terrorism: Is one man’s terrorist another man’s freedom fighter? *Media Asia*, 29(23): 123-133
- Ganor, B. (2005). *Counter-Terrorism Puzzle: A Guide for Decision Makers*. New Jersey: Transaction Publishers, Rutgers.
- Goffman, E. (1974). *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. Boston: Northeastern University Press.
- Halverson, C.M. (2003). Lifting the dark threat: The impact of metaphor in the war against terror. *UW-L Journal of Undergraduate Research*, 2: 1-39.
- Heradstveit, D. & Bonham, G.M. (2007). What the axis of evil metaphor did to Iran. *Middle East Journal*, 61(3): 421-440
- Hulsse, R & Spencer, A. (2008). The metaphor of terror: Terrorism studies and the constructivist turn. *Security Dialogue*, 39(6): 571-592.
- Jekins, P. (2003). *Image of Terror*. New York: Aldine de Gruyuter.
- Juergensmayer, M. (2003). *Terorisme para pembela agama* (Amien Rozany Pane, Pentj.) Yogyakarta: Tarawang Press.
- Kibble, D. G. (2002). The attacks of 9/11: Evidence of a clash of religion? *Parameters, Autumn*: 34-45
- Kruglanski, A.W., Crenshaw, M., Post, J.M., & Victoroff, J. (2008). What should this fight be called? Metaphors of counterterrorism and their implication. *Psychological Science in the Public Interest*, 8(3): 97-133
- Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). *Metaphor We Live by*. Chicago: University Chicago Press.
- Lummis, C. D. (2008). *Terror and the Terrorist*. Penang: Multiuniversity & Citizens International.
- Mahathir Mohammad. (2003). *Terrorism and the Real Issues*. Putrajaya: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd.
- Mansour Al-Eisa. (2003). *Islamic: A victim of terrorism* (Report Documentation, approved OMB No. 0704-0188: 1-23). USAWC Strategy Research Project, US Army War College, Carlisle Barracks.
- Manulang, A. C. (2006). *Terorisme dan Perang Intelijen; Dugaan Tanpa Bukti*. Jakarta: Manazaitun.

- Marks, A. T. (2007). State response to terrorism in Sri Lanka. In J. J. F. Forest, (Ed.), *Countering terrorism and insurgency in the 21st century international perspective* (pp. 261-274). United State of America: Greenwood Publishing Group, Inc.
- McDonald, I. R. & Lawrence, R. G. (2008). Filing the 24 x 7 news hole: Television news coverage following September 11. In S. Mahan & P. I. Griset (Eds), *Terrorism in perspective* (pp. 232-240). United States: Sage Publication
- McQuail, D. (2000). *Mass Communication Theory: An Introduction* (4th ed.). London: Sage Publication.
- Modell, A. H. (2009). Metaphor—the bridge between feelings and knowledge. *Psychoanalytic Inquiry*, 29: 6-11.
- Norris, P., Kern, M. & Just, M. (2003). *Framing Terrorism: The New Media, the Government and the Public*. New York: Routledge.
- Pan, Z. & Kosicki, G.M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 10(1): 55-75.
- Reese, S.D. (2001). Prologue—Framing public life: A bridging model for media research. In S.D.Reese, O. H. Gandy Jr, & A.E. Grant (Eds.), *Framing public life, perspectives on media and our understanding of the social world* (pp. 7-31). London: Lawrence Erlbaum.
- Reese, S.D. & Lewis, S.C. (2009). Framing the war on terror: The internalization of policy in the US press. *Journalism*, 10(6): 777-797
- Romli, A. S. M. (2000). *Demonologi Islam; Usaha Barat Membasmi Kekuatan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Sharom TM Sulaiman. (2002). *Terorisme Global dan Teroris Agama*. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distrubution Sdn. Bhd.
- The Social Science Encyclopedia*. (1996) (2nd ed). United Kingdom: Routledge
- Tuchman, G. (1978). *Making News: A Study in the Construction of reality*. New York: The Free Press.
- Weeden, G.P. (2004). *Religion as a dimension of the global war on terrorism*. Report Documentation, Joint Military Operations Department Naval War College, Approved OMB No. 0704-0188: 1-22.
- Wilkinson, P. (1974). *Political Terrorism*. London: The Macmillan Press. Ltd.
- Whittaker, J.D. (2004). *Terrorists and Terrorism in the Contemporary World*. London: Routledge.
- Zhang, Y. (2006). Beyond anti-terorrism: Metaphors as message strategy of post September–11 U.S. public diplomacy. *Public Relation Review*, 33: 31-39.